

PENGARUH PAD, DAU, DAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Adhi Prasetyo* dan Ade Nurul Aida**

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: * adhiprasw@gmail.com, ** dhena_adhe@yahoo.com

Abstract

This study investigate the effect of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) to economic growth and poverty at district/city in Indonesia for 2012-2014. Research using the method of path analysis with secondary data in the form of a panel consisting of 33 provinces include 441 district/city in Indonesia were sourced from the Directorate General of Financial Equalization (DJPK) and the BPS-Statistics Indonesia. Results shows that the PAD and DAU effect on economic growth in each district/city area. Otherwise DAK has no effect against economic growth. In addition, this analysis also showed that PAD, and DAU effect on poverty, but DAK had no effect against poverty at district/city in Indonesia. While economic growth would also have an effect on poverty. From the analysis also looks that indirectly PAD, and DAU to decrease poverty through increased economic growth.

Key words: *Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth and Poverty*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. Menurut Thesaurianto (2007), salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Jadi, munculnya otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola keuangan dengan lebih mandiri. Dengan demikian daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota (Bratakusumah dan Solihin, 2001).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian Widiyanto (2015) dalam analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada kota Tegal, menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Penelitian Santosa (2013) tentang pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Daerah terhadap pertumbuhan, pengangguran dan kemiskinan daerah dari 33 Propinsi di Indonesia menyatakan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah, namun DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan daerah, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana tidak berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan daerah. Dari analisis pengaruh antar variable secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh baik PAD, DAU, DAK, maupun DBH terhadap penurunan pengangguran maupun kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai banyaknya hasil studi yang berbeda-beda mengenai kebijakan desentralisasi fiskal ini menunjukkan masih adanya *research gap*. Dimana dengan diberlakukan desentralisasi fiskal, seharusnya lebih dirasakan langsung oleh kabupaten/kota dan sampai saat ini masih belum ada penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada Kabupaten/Kota. Hal ini menarik penulis untuk mencoba menganalisis kembali penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai, yang dapat mempertajam penjelasan mengenai apakah PAD, DAU, dan DAK yang diterapkan akan benar-benar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung akan menurunkan kemiskinan yang ada di daerah dengan mengambil judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Indonesia;
- b. Bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia; dan
- c. Bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Indonesia.

1.3. Tujuan Analisis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia; dan
- c. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Aspek penerimaan merupakan salah satu faktor utama sumber daya yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah demi keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri.

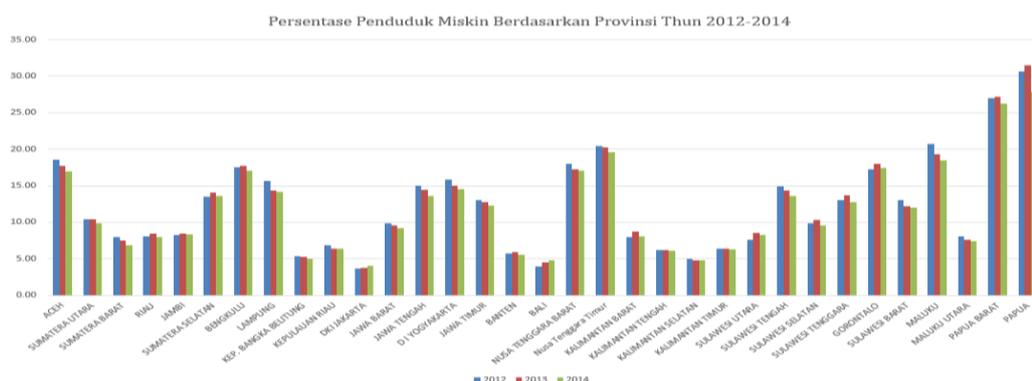
Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal ini terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer ke daerah (DBH, DAU, DAK).

Pemerintah sendiri meyakini dengan besarnya alokasi transfer ke daerah yang meningkat dari tahun ke tahun mampu menurunkan kemiskinan. Namun sayangnya tingkat kemiskinan saat ini masih cukup tinggi. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Lima daerah tertinggi menurut tingkat kemiskinan pada kawasan ini adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Di tingkat kabupaten, berdasarkan persentase penduduk miskin tahun 2014, kabupaten Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo merupakan kabupaten yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 44,49 persen, 39,26 persen dan 39,02 persen. Kabupaten tersebut berada dalam kawasan Provinsi Papua.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di tingkat daerah. Upaya pembangunan yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan adalah salah satunya dengan mendorong pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam melihat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Susanti, 2007). World Bank (2007) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya penggerak terpenting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, upaya menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin membutuhkan upaya menciptakan pertumbuhan sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh penduduk miskin.

Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Tahun 2012-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.2. Dana Alokasi Umum

Menurut Bastian (2003:84), "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah". Sedangkan menurut Halim (2002:160), DAU adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa DAU memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, DAU dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

Tujuan DAU adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Penggunaan DAU ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang menggunakan beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

2.3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kriteria pengalokasian DAK, yaitu:

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
- b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
- c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai suatu perekonomian. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

2.5. Kemiskinan

Kemiskinan umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu (1) *headcount index*, (2) indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*). (3) indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). *Headcount index* digunakan untuk mengukur kebutuhan absolut yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non makanan (*non-food line*). Garis kemiskinan BPS sebagai dasar untuk perhitungan *headcount index* ditentukan berdasarkan batas pengeluaran minimum untuk konsumsi makanan setara dengan 2100 kalori per hari dan konsumsi non makanan (Yacoub, 2012).

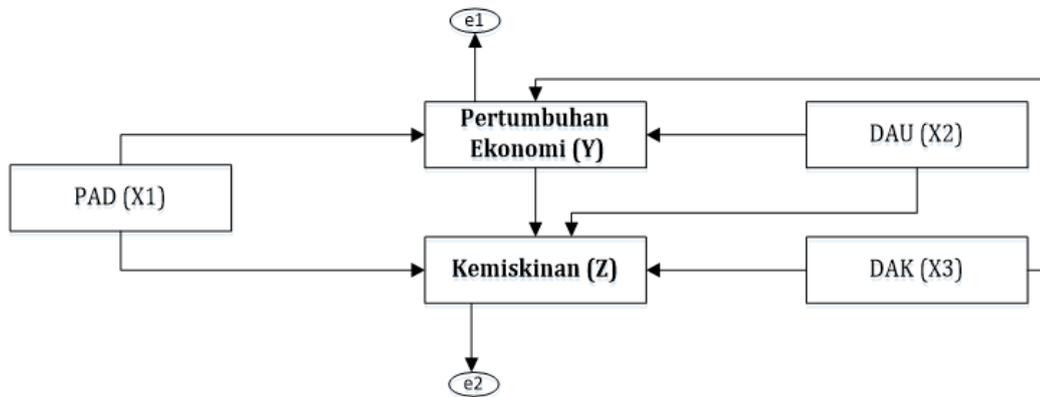
Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi. Sen (1995) menyatakan bahwa “kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*)”

3. Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan analisis ini, menggunakan data sekunder berupa panel yang terdiri atas 33 provinsi yang mencakup 441 kabupaten/kota di Indonesia dengan kurun waktu 2012-2014. Data tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta pertumbuhan dan kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur/*path analysis*.

Berdasarkan hubungan antar variabel, maka desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Jalur dari Model Teoritis Penelitian



Adapun persamaan regresi dari desain penelitian tersebut adalah

$$Y = \alpha_i + aX_i + e_1; i = 1,2,3 \dots$$

$$Z = \beta_i + bY_i + e_2$$

$$Z = \gamma + aX_1 + cX_2 + dX_3 + e_3$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

Z = Kemiskinan

4. Hasil dan Pembahasan

Hipotesis dalam analisa ini adalah menguji pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1. Pengaruh dan Signifikasi Antar Variabel

Hubungan Antar Variabel	Koefisien	t-hitung	p-value	Keterangan
X1 → Y	6.08E-08	2.518928	0.0119	Signifikan
X2 → Y	1.75E-06	2.297045	0.0219	Signifikan
X3 → Y	0.001768	0.995207	0.3199	Tidak Signifikan
Y → Z	-0.371505	-2.250824	0.0246	Signifikan
X1 → Z	-0.045161	-9.303102	0.0000	Signifikan
X2 → Z	-0.017641	-2.514843	0.0121	Signifikan
X3 → Z	-0.003355	-0.686720	0.4924	Tidak Signifikan

X1 → Y → Z	-2.26E-08	Signifikan
X2 → Y → Z	-6.50E-07	Signifikan
X3 → Y → Z	-2.26E-08	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil estimasi regresi, terlihat bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chan dan Ho dalam Abdu Rahman (2002) dan Adi (2006), yakni semakin tinggi PAD, maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya. Hal ini dikarenakan karena bertambahnya penerimaan asli daerah berupa pajak maupun retribusi, mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Adapun pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dari hasil estimasi regresi menunjukkan pengaruh yang signifikan positif, dimana dengan peningkatan DAU, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena DAU yang diterima oleh kabupaten/kota dapat dioptimalkan dalam peningkatan kemampuan fiskal daerah dan menjadi salah satu sumber pendanaan dari pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehingga DAU tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryati dan Endrawati (2010) bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa pengaruh DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Hamzah (2007). Tidak berpengaruhnya secara signifikan DAK terhadap pertumbuhan, dikarenakan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain. Yang berarti tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan tersebut.

Hasil estimasi regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Dalam hal ini pengaruh pertumbuhan ekonomi adalah negatif terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari SMERU Research Institute (dikutip dari Kuncoro 2003) dan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Hamzah (2007) yang menjelaskan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin berkurang kemiskinan. Karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan, Mankiw (1995).

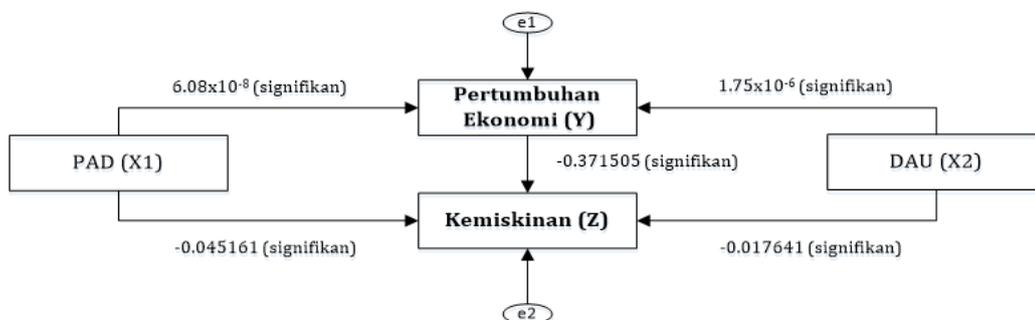
Mengacu pada hasil estimasi regresi, PAD dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, sementara DAK tidak berpengaruh signifikan

terhadap kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2016) bahwa apabila PAD, dan DAU mengalami peningkatan, maka akan dapat menurunkan kemiskinan. Sebaliknya semakin tinggi DAK yang diterima oleh pemerintah daerah maka tidak dapat mengurangi kemiskinan.

Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan, karena PAD yang diterima sebagian dapat digunakan untuk mendukung dan membiayai program pengentasan kemiskinan. Sementara dari sisi DAU, alokasi DAU diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan formula yang memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk dan kapasitas fiskal daerah itu sendiri, serta sebagian besar bersifat *block grant*, sehingga penggunaannya menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, termasuk kebutuhan dalam menanggulangi kemiskinan.

Untuk variabel DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara statistik, karena pada saat pengujian variabel DAK tidak signifikan mempengaruhi variabel kemiskinan. Untuk pengaruh tidak langsung variabel DAK juga tidak dihitung karena saat pengujian sub struktural pertama (dimana pertumbuhan sebagai variabel dependen/terikat), terlihat bahwa variabel DAK juga tidak signifikan sehingga variabel DAK dieliminasi dari model tersebut, hal ini sesuai dengan trimming theory sebagai indikator validitas model di dalam analisis jalur, dimana jalur-jalur yang non signifikan dikeluarkan sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empiris. Adapun model dalam bentuk diagram jalur berdasarkan teori tersebut seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 2. Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel



Dari model di atas, menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien regresi yang lebih kecil dibandingkan dengan pengaruhnya secara langsung terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini pun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan antara PAD dengan kemiskinan. Sementara DAU pun memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan atau perubahan nilai DAU secara tidak langsung mengakibatkan perubahan kemiskinan melalui adanya perubahan pertumbuhan ekonomi, dan hal ini pun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan antara DAU dengan kemiskinan.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Tujuan analisis ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dari 33 provinsi yang mencakup 441 kabupaten/kota di Indonesia. Dari analisis ini diperoleh hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/kota daerah. Sebaliknya DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan bahwa PAD, dan DAU berpengaruh terhadap kemiskinan, namun DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia. Sementara pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Dari analisis tersebut juga terlihat bahwa secara tidak langsung PAD, dan DAU berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

5.2. Rekomendasi

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan kepada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia supaya dapat menciptakan strategi optimalisasi sumber pendapatan lain yang baru dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengelola bersama dengan Dana Alokasi Umum dan Khusus secara tepat guna dan tepat sasaran sehingga secara langsung maupun tidak langsung mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan kemiskinan di daerah.

Untuk penelitian selanjutnya perlu menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel tersebut dengan variabel-variabel yang lain yang relevan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tentunya dengan *range* waktu yang lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. Undip. Semarang.
- BPPK. 2016. Pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia: Sudah Inklusifkah?. Diakses dari <http://ap2i-nasional.or.id/2016/06/analisis-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-ringkasan-artikel-dan-hasil-penelitian/>. Tanggal akses 2 Mei 2017
- Bratakusumah dan Solihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Maryati, Ulfi, dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 5 (2) , 68-84.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol.5, No.2, Juli 2013
- Sen A. 1995. A Sociological Approach to The Measurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend. *Oxford Economic Papers* 37: 669-676.
- Setiyawati, Anis, dan Hamzah, Ardi. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Desember 2007, Vol.4, No. 2, hal. 211-228
- Tajuddin, Ilham, dkk. 2014. The Effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds And Revenue-Sharing Fund On Investment, Economic Growth, Economic Structure, And Employment. *Quest Journal: Journal of Research in Business and Management* Vol 2- Issue 10 (2014) pp: 54-61
- Thesaurianto, K. 2007. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Vibiz Regional Research Center. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Diakses dari <http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2015/03/PENGARUH-PERTUMBUHAN-EKONOMI-PROV-SUMSEL.pdf>
- Widianto, Andri. 2015 Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Jurnal. Politeknik Harapan Bersama Tegal*.
- Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 201, hal 176 – 185